

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini era globalisasi akan menimbulkan persaingan bisnis yang semakin kompetitif dan kompleks, karena pelaku bisnis harus bersaing dengan pesaing dalam negeri dan pelaku bisnis dari negara lain. Disamping era globalisasi ekonomi, pada saat ini juga perkembangan teknologi cukup pesat. Hal ini akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Dampak negatif yang terjadi dari perkembangan teknologi adalah kegagalan bisnis. Indonesia sebagai negara berkembang, menggiatkan pembangunan nasional secara terus menerus perlu ditingkatkan sehingga Indonesia mampu bertahan dalam menghadapi kerasnya persaingan global yang ada. Salah satu penopang utama dalam pembangunan nasional adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam BUMN diperlukan adanya komponen monitoring struktur pengendalian intern dimana salah satu elemennya adalah audit internal. Dalam organisasi BUMN diperlukan adanya tenaga auditor internal dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Unit kerja auditor internal dalam perusahaan BUMN

dikenal dengan sebutan Satuan Pengawasan Intern (SPI) tujuannya adalah untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 pada Bab VI dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada setiap BUMN dibentuk Satuan Pengawas Intern.
2. Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
3. Atas permintaan tertulis Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas suatu organisasi lainnya dalam BUMN sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Kegiatan pemeriksaan internal pada BUMN, auditor internal berada langsung dibawah Direktur Utama. Lahirnya audit internal, khususnya SPI (Satuan Pengawas Intern) pada BUMN, tidak terlepas dari peran BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan). Peran BPKP adalah melaksanakan dan memberikan bimbingan dan pembinaan di bidang pengawasan, khususnya *internal auditing* di Indonesia cukup dominan.

Auditor internal merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam sistem pengendalian perusahaan. Auditor internal tidak hanya melakukan evaluasi terkait keuangan perusahaan tapi juga pada non-keuangan yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini akan membantu manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui rekomendasi auditor internal yang didapatkan dari evaluasi tersebut. Auditor internal dituntut secara profesional untuk melaksanakan fungsi audit dengan baik. Pentingnya eksistensi seorang auditor internal, menuntut para auditor internal untuk memiliki kompetensi dan independensi dalam melaksanakan tugasnya.

Kualitas audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku. Hasil audit dikatakan berkualitas jika pemeriksaan (audit) dapat meningkatkan bobot pertanggungjawaban serta dapat memberikan informasi pembuktian ada tidaknya penyimpangan dari standar-standar audit.

Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) menyatakan kualitas hasil pemeriksaan yaitu laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketidakpatuhan, harus dilengkapi tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta tindakan koreksi yang direncanakan.

Kompetensi seorang auditor internal sangat dibutuhkan dalam melakukan audit. Kompetensi seorang auditor internal diuji dari pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Seorang auditor internal harus memiliki pengetahuan yang diukur

dari seberapa tinggi pendidikan auditor, karena dengan demikian semakin banyak auditor internal mempunyai pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara makin mendalam. Seorang auditor internal juga harus berpengalaman dalam melakukan audit. Semakin lama auditor melakukan pemeriksaan maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki sebagai seorang auditor internal. Pengalaman kerja sebagai auditor internal hendaknya memiliki keunggulan dalam mendeteksi kesalahan, memahami kesalahan secara mendalam, dan mencari penyebab masalah tersebut.

Sikap mental independen sama pentingnya dengan keahlian dibidang praktik akuntansi dan prosedur audit yang harus dimiliki oleh setiap auditor internal. Auditor internal tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi juga harus menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan independensinya diragukan oleh organisasi dimana auditor internal tersebut bernaung. Sikap perilaku independen auditor internal tersebut harus jelas dan tidak dipengaruhi agar dipercaya oleh perusahaan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka manajemen dituntut untuk memberdayakan satuan audit internal agar dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam meningkatkan kinerjanya.

Kualitas dari auditor internal masih menjadi sorotan. Kondisi ini terjadi di BUMN, banyak temuan audit yang tidak terdeteksi oleh Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai auditor internal, tetapi ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor eksternal, hal ini menunjukkan bahwa kualitas audit internal di BUMN masih kurang baik. Sebagai pihak internal perusahaan, maka beberapa

aktivitas dalam proses audit yang dilakukan mungkin akan lebih berpihak pada keuntungan yang diperoleh perusahaan yang memungkinkan untuk menutupi segala aktivitas perusahaan yang kurang baik. Auditor eksternal dalam melakukan tugasnya akan melihat bagaimana kualitas audit internal dalam perusahaan sebagai suatu indikator pengendalian terhadap segala kecurangan-kecurangan dan kesalahan-kesalahan yang rentan dilakukan oleh manajemen perusahaan. Jika auditor menilai bahwa kualitas audit internal kurang baik, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa fungsi pengendalian internal dalam perusahaan tersebut juga rendah, sehingga kepercayaan auditor eksternal terhadap auditor internal sangat tergantung dari hasil penilaian kualitas audit internal dalam suatu perusahaan.

Dengan demikian, kualitas audit internal merupakan hal yang penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kepercayaan auditor eksternal selaku pihak independen yang berada di luar perusahaan maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan.

Beberapa fenomena yang terjadi di BUMN khususnya pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Fenomena Kualitas Audit Internal Di BUMN Yang Ditemukan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

No.	Sumber	Kasus	Isi
1.	Selasa, 12 April 2016 11:52 WIB www.pikiran- rakyat.com	Permasalahan berdampak finansial yang mengakibatkan kerugian negara	Badan Pemeriksa Keuangan RI menyerahkan ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS) beserta laporan hasil pemeriksaan semester II tahun 2015 kepada DPR RI. Dalam laporannya, BPK

	<p>rakyat.com/nasiona/2016/04/12/8733-masalah-ditemukan-dalam-ihps-semester-ii-2015-366485</p> <p>Oleh: Muhammad Ashari</p>		<p>menemukan masalah berdampak finansial senilai Rp 9,87 triliun dari pemeriksaan di berbagai instansi pemerintahan.</p> <p>Penyerahan IHPS dilaksanakan dalam sidang paripurna DPR RI, Selasa, 12 April 2016. Dalam sidang paripurna, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis membacakannya ke hadapan anggota dewan. Laporan hasil pemeriksaan itu dilakukan di 92 instansi pemerintah pusat, serta 41 BUMN dan badan lainnya.</p> <p>Harry menyebutkan, terdapat 6.584 temuan yang mengandung 8.733 permasalahan. Perinciannya, sebanyak 2.175 (25%) kelemahan SPI, 6.558 (75%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 11,49 triliun.</p> <p>“Dari permasalahan kepatuhan itu, sebanyak 2.53 permasalahan (39%) merupakan masalah berdampak finansial senilai Rp 9,87 triliun,” ujarnya.</p> <p>Permasalahan berdampak finansial itu terdiri dari permasalahan yang mengakibatkan kerugian negara sebanyak 1.401 (55%) permasalahan senilai Rp 710,91 miliar. Potensi kerugian negara sebanyak 453 (18%) permasalahan senilai Rp 1,15 triliun dan kekurangan penerimaan sebanyak 683 (27%) permasalahan senilai Rp 8 triliun.</p>
2.	<p>Diposting: Selasa, 07 Juni</p>	<p>BUMN belum optimal dalam merancang dan menyusun Sistem</p>	<p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepada 21 BUMN terkait dengan operasional</p>

	<p>2016 08:11 WIB</p> <p>http://finansial.bisnis.com/read/20160607/9/555111/sistem-pengendalian-internal-bpk-audit-khusus-21-bumn</p> <p>Oleh:</p> <p>Anugerah</p> <p>Perkasa</p>	<p>Pengendalian Internal (SPI) dan belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>perusahaan milik negara tersebut, yang salah satunya mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan.</p> <p>Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015 menyatakan hasil pemeriksaan pada BUMN mencakup 21 objek pemeriksaan atas operasional BUMN dan tiga objek pemeriksaan atas pengelolaan lahan. Pada Semester II/2015, BPK menyelesaikan pemeriksaan terhadap pengelolaan operasional pada 21 BUMN yang terdiri dari tiga perum dan 18 persero.</p> <p>Lembaga audit negara itu menyatakan hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya BUMN telah merancang dan menyusun Sistem Pengendalian Intern (SPI) secara memadai, namun penerapannya belum optimal. Hal itu terlihat terkait dengan upaya mengamankan kekayaan perusahaan, pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>"Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam operasional BUMN, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan," demikian dokumen IHPS II Tahun 2015 yang dikutip Bisnis, Selasa (7/6).</p> <p>BPK menemukan permasalahan terdiri dari berbagai macam yakni SOP yang belum disusun, pelaksanaan kebijakan yang</p>
--	--	---	---

		<p>mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP yang tak ditaati dan lain-lain. Sejumlah masalah adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (belum memiliki kebijakan strategis untuk perluasan pangsa pasar dan SOP penutupan rute penerbangan).</p> <p>Lainnya adalah PT Semen Padang (belum memiliki SOP tentang penyusunan HPS dalam proses pengadaan); PT Kimia Farma Tbk (belum memiliki kebijakan baku dalam penghapusan piutang ragu-ragu); PT Angkasa Pura II (belum memiliki prosedur sebagai data pembanding manifest jumlah penumpang final yang menjadi subjek pelayanan jasa pesawat udara, sehingga pendapatan hanya didasarkan manifest final yang disahkan pejabat perusahaan penerbangan).</p> <p>BPK juga menemukan pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. Di antaranya adalah PT Bukit Asam Tbk (belum menerapkan Perdirjen Minerba terkait penyesuaian jarak angkut atas penjualan batu bara ke PLN pada 2013-2014 yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan); Perum Perhutani (kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan karena tak dapat memenuhi target produksi air minum dalam kemasan sesuai dengan pihak ketiga) dan PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (proses pengambilan agunan yang diambil alih tak sesuai dengan ketentuan misalnya tak didukung dokumen</p>
--	--	--

			<p>legal yang memadai).</p> <p>Masalah lainnya adalah penyimpangan peraturan di bidang tertentu. Hal itu di antaranya adalah PT Timah Tbk (belum menyusun dokumen Amdal untuk wilayah tambang DU 956 di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau walaupun sudah memiliki IUP); PT Pelindo II (melakukan perjanjian pengelolaan terminal peti kemas dengan PT JICT yang belum memiliki izin usaha sebagai badan usaha pelabuhan); PT Hotel Indonesia Natour (perusahaan belum melunasi pajak pembangunan beserta sanksinya atas unit Inna Simpang Surabaya dan Head Quarter Bali).</p> <p>BPK menegaskan secara keseluruhan hasil pemeriksaan operasional BUMN pada 21 BUMN mengungkapkan 264 temuan yang memuat 348 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 164 kelemahan SPI dan 184 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp1,17 triliun</p>
3.	<p>Diposting: Rabu, 04 Oktober 2017 14:05 WIB http://amp.kontan.co.id/news/bpk-periksa-kai-ada-permasalahan-rp-</p>	<p>Permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan maupun kelemahan sistem pengendalian internal atas pengelolaan investasi di PT KAI.</p>	<p>Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melakukan pemeriksaan pengelolaan investasi pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI). Dari hasil pemeriksaan ini, BPK menyimpulkan pengelolaan investasi PT KAI beserta anak perusahaan telah mematuhi perundang-undangan dan ketentuan yang terkait.</p> <p>Namun seperti dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester</p>

	<p>159-miliar</p> <p>Oleh: Ramadhani</p> <p>Prihatini</p>	<p>(IHPS) I 2017, BPK masih menemukan banyak permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan maupun kelemahan sistem pengendalian internal. Ini ditemukan selama hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi PT KAI dan anak perusahaan tahun buku 2014 sampai triwulan I 2016.</p> <p>Yudi Ramdan, Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI menyatakan secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi pada PT KAI dan anak perusahaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 19 permasalahan senilai Rp 15,91 miliar.</p> <p>Ia bilang, permasalahan tersebut, meliputi 7 kelemahan sistem pengendalian intern, 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2 permasalahan ketidakhematan.</p> <p>"Namun, selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas perusahaan senilai Rp 6,60 miliar," kata dia, Rabu (4/10).</p> <p>Berdasarkan IHPS tersebut, beberapa permasalahan PT KAI antara lain terkait rencana penggunaan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) belum disusun secara cermat dan belum ada koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.</p>
--	---	--

			<p>Akibatnya, penyertaan modal negara (PMN) Rp 2 triliun pada PT KAI untuk jalur KA Trans Sumatera menjadi <i>idle</i> karena tidak dimanfaatkan.</p> <p>Selanjutnya, PT KAI tidak optimal dalam melakukan koordinasi dengan Pemkot Tangerang dalam perencanaan pembangunan jalur kereta api bandara Soekarno-Hatta. Sehingga terjadi pemborosan senilai Rp 2,88 miliar atas hasil studi kelayakan pembangunan jalur KA bandara melalui pusat Kota Tangerang yang tidak digunakan. Ini lantaran penolakan perizinan dari Pemkot Tangerang.</p> <p>Kemudian, PT Kereta Api Properti Manajemen (KAPM) yang ditunjuk langsung sebagai kontraktor utama, mengalihkan seluruh pekerjaan kepada subkontraktor tanpa melalui prosedur pemilihan, dan subkontraktor menargetkan keuntungan yang melebihi kewajaran. Ini menyebabkan kelebihan pembayaran senilai Rp 6,47 miliar.</p> <p>Terakhir, pejabat pengadaan barang dan jasa belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya . Serta masih ada kelemahan dalam proses pengadaan, penyusunan dan pelaksanaan kontrak. Hal ini menyebabkan penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa mengakibatkan PT KAI dan anak perusahaan tidak dapat memperoleh harga pekerjaan yang paling menguntungkan perusahaan.</p> <p>Dikutip pada IHPS yang</p>
--	--	--	--

			<p>diterbitkan BPK, PT KAI menanggapi atas permasalahan tersebut. Pada umumnya PT KAI dan anak perusahaan sependapat dengan hasil temuan pemeriksaan BPK.</p> <p>PT KAI juga disebut akan mengakomodasi peraturan tentang jasa konstruksi di dalam keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Tangerang dalam penetapan trase pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, PT KAPM telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke PT KALOG senilai Rp 6,6 miliar.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa lemahnya pelaksanaan pemeriksaan internal dalam perusahaan, serta kurangnya sikap kompetensi dan independensi auditor. Untuk mencegah terjadinya kasus kegagalan audit, auditor internal dituntut untuk bersikap kompeten dan independen.

Berikut ini beberapa penelitian yang berhubungan dengan kualitas audit internal:

1. M Nizarul Alim (2007) dalam penelitian yang berjudul pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai moderasi. Hasil penelitian menunjukkan variabel bahwa kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2. Marthadinata Pratiwi Manullang (2011) dalam penelitian yang berjudul pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kompetensi dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3. Otnil Lam Togar (2016) dalam penelitian yang berjudul pengaruh kompetensi, independensi dan motivasi terhadap kualitas audit internal. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi, independensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit

Bila dilihat kualitas audit internal dan banyaknya kasus di BUMN, maka dapat dikatakan bahwa kualitas audit internal di BUMN masih kurang karena dalam pelaksanaan auditnya, auditor internal belum mampu menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga penyimpangan yang terjadi tidak dapat segera diperbaiki. Hal tersebut terlihat dari data Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dalam Ihtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II (2011:256) atas Satuan Pengawas Intern di BUMN menunjukkan bahwa auditor internal masih kesulitan dalam menemukan temuan-temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan dan dalam penyelesaian temuan berlarut-larut. Hal ini menunjukkan kompetensi auditor internal pada BUMN masih harus ditingkatkan.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini merupakan replikasi dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penulis ingin mencoba menguji pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit internal pada unit internal audit PT Kereta Api Indonesia (Persero). Pemilihan unit penelitian ini dilakukan karena kualitas audit internal sangat dibutuhkan. Dengan adanya

kualitas audit internal yang tinggi, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan, yang dapat mengikis kepercayaan terhadap hasil audit atas laporan keuangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“PENGARUH KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KUALITAS AUDIT INTERNAL (Survei Pada PT Kereta Api Indonesia (Persero))”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka penulis merumuskan masalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompetensi Auditor Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Bagaimana Independensi Auditor Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Bagaimana Kualitas Audit Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Seberapa pengaruh Kompetensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

5. Seberapa pengaruh Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
6. Seberapa pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara simultan.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data-data, mencari dan mendapatkan informasi sehubungan dengan pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit internal pada PT Kereta Api Indonesia (Persero). Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendapatkan bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui bagaimana Kompetensi Auditor Internal PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Untuk mengetahui bagaimana Independensi Auditor Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
3. Untuk mengetahui bagaimana Kualitas Audit Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
4. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero).
5. Untuk mengetahui pengaruh Independensi Auditor Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero).

6. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Internal terhadap Kualitas Audit Internal di PT Kereta Api Indonesia (Persero) secara simultan

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membutuhkan, antara lain:

1. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan penulis khususnya mengenai Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit Internal PT Kereta Api Indonesia (Persero). Selain itu, sebagai sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dalam bangku perkuliahan terutama yang berkaitan dengan judul dalam penelitian ini.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Perusahaan dalam menilai Kualitas Audit Internal berkaitan dengan Kompetensi dan Independensi Auditor.

3. Bagi Pihak Lain

Menambah wawasan dan pengetahuan akuntansi khususnya dalam mata kuliah *auditing* dengan memberikan bukti tentang pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit internal. Memberikan

informasi dan referensi kepada pihak-pihak lain yang ingin melakukan penelitian dan tertarik pada topik yang sejenis.

4. Bagi instansi Pendidikan

Memperoleh informasi tentang kualifikasi yang dibutuhkan dunia kerja, serta sebagai alat evaluasi terhadap kurikulum yang digunakan.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit internal.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bertempat di PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang jasa dan transportasi di JL. Perintis Kemerdekaan No. 1 Bandung 40117.

1.5.2 Waktu Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret sampai dengan Juli 2017. Adapun waktu penelitian diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan								
		Maret 2018	April 2018	Mei 2018	Juni 2018	Juli 2018	Agst 2018	Sep 2018	Okt 2018	Nov 2018
I	Tahap persiapan:									
	1. Mengambil Formulir Penyusunan Usulan Penelitian									
	2. Membuat Matriks									
	3. Bimbingan dengan Dosen Pembimbing									
	4. Menentukan Tempat Penelitian									
	5. Seminar Usulan Penelitian									
II	Tahap Pelaksanaan:									
	1. Meminta Surat Pengantar ke Perusahaan									
	2. Melakukan Penelitian di Perusahaan									
	3. Penyusunan Skripsi									
III	Tahap Pelaporan:									
	1. Menyiapkan Draft Skripsi									
	2. Sidang Akhir Skripsi									
	3. Penyempurnaan Skripsi									

